



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



THE OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP

LEARNING SITE: BITUNG, INDONESIA

RINGKASAN

The Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) melakukan sebuah kajian di akhir 2016 tentang *value chain assessment* (VCA) pada industri tuna di Bitung. Pelaksana kajian adalah Marine Change, sebuah perusahaan konsultan yang berfokus terhadap investasi pada sektor kelautan di Asia yang telah menerapkan bisnis berkelanjutan. VCA dilakukan sebagai langkah pertama untuk memahami proses dan persyaratan dari *catch documentation and traceability* (CDT) sepanjang rantai nilai, mengidentifikasi pasar utama untuk ekspor dan eksplorasi persyaratan dari pasar/pembeli dan preferensi konsumen. Kajian ini akan mendukung desain dari CDT, pembentukan kemitraan dan keterlibatan industri di Bitung dan di sepanjang rantai nilai.

TEMUAN

RINGKASAN TENTANG PERIKANAN

Produksi Ikan Tuna di PPS Bitung: 36.842 tons (2015); Dari semua jenis ikan yang ditangkap dan dilaporkan di Bitung antara 2011-2014, 81-90% di antaranya merupakan spesies ikan tuna.

Tipe Kapal dan Jenis Alat Tangkap: 1.040 kapal yang terdaftar: 80% < 30 GT dan 32% < 5GT

- **Perikanan Pancing Ulur (Handline):** 46% dari kapal yang terdaftar, menggunakan alat tangkap *hand line*
- **Perikanan Purse seine:** 32% dari kapal yang terdaftar, menggunakan alat tangkap *purse seine*
- **Perikanan Huhate (Pole and line):** 3% dari kapal yang terdaftar, menggunakan alat tangkap *pole and line*
- **Perikanan lainnya:** 19% dari kapal yang terdaftar, menggunakan alat tangkap lainnya, termasuk *beach seine, gill net, trawl* dan *bottom longline*

Nelayan: Tipologi nelayan di Bitung tergolong luas, mulai dari nelayan

mandiri skala kecil yang memiliki kapal kecil dan beroperasi harian, hingga ke nelayan yang dipekerjakan oleh pelaku usaha skala kecil, menengah dan besar, yang mengoperasikan kapal tangkap ke wilayah yang lebih jauh. Ada sekitar 6.700 orang yang terlibat di dalam kegiatan perikanan di sekitar PPS Bitung.

Pedagang: 11 pedagang terdaftar (memiliki ijin) dan pedagang tidak terdaftar (yang tidak diketahui jumlahnya), keduanya berperan dalam pengumpulan dan logistik di Bitung, memindahkan ikan dari titik pendaratan ke pengolahan untuk diekspor ataupun untuk dijual ke pasar lokal.

Pengolahan: Ada 67 pengolah terdaftar di Bitung, melakukan proses *loining, packaging, smoking* dan *freezing* dari ikan tuna. Apabila digabungkan, maka para pengolah ini memiliki kapasitas produksi 939 ton/hari dan kapasitas terpasang secara keseluruhan adalah 17.756 ton (per day?) dari *cold storage* dan 1.136 dari *air blast freezer storage*.

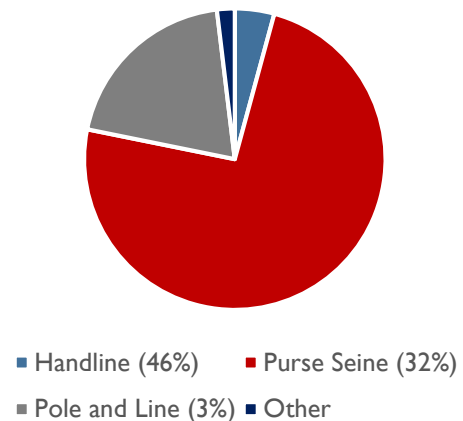
Pengalengan: Ada 7 pengalengan ikan tuna terdaftar di Bitung dengan kapasitas terpasang secara keseluruhan dari ketujuh pengalengan tersebut adalah 585 ton/hari.

Pasar Ekspor: 79% dari produksi ikan tuna di Bitung diekspor ke Jerman, U.K., Thailand, U.S. dan Swiss antara Tahun 2011-2015.

Produksi dan Volume Ekspor (2015): Secara total sebesar 45.208.5 ton

- **Yellowfin:** 9.662,7; 1.152 diekspor ke U.S., 525,8 ke Swiss, 291,2 ke Australia, 213,5 ke Spanyol

Produksi (Volume) Ikan Tuna Berdasarkan Alat Tangkap, Bitung (2015)



- *Skipjack*: 18.263,1; 4.085 diekspor ke U.K., 3.352,3 ke Jerman, 283,2 ke Belanda, 219,4 ke Swiss
- *Eastern little tuna*: 53,9
- *Frigate*: 8.746,5
- *Bigeye*: 116,4
- *Other species*: 8.366

SERTIFIKAT HASIL TANGKAP IKAN (SHTI) DAN KETERTELUKURAN SAAT INI

Meliputi perikanan tangkap di Indonesia yang menjadi subjek dari persyaratan pemerintah untuk ijin usaha, seperti ijin menangkap ikan, ijin pemindahan ikan atau ijin usaha. Serupa dengan itu, kapal penangkap ikan, bergantung dari ukurannya, menjadi subjek untuk persyaratan perijinan dan dokumentasi, contohnya dokumen registrasi kapal. For fishing vessels <5GT, catch certificates, issued by the government, are required. Otoritas pelabuhan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SHTI. Ada dua dokumen SHTI yaitu Lembar Awal dan Lembar Turunan.

Lembar Awal SHTI diperlukan untuk kapal penangkap ikan di atas 5 GT, dan terdiri atas dokumen-dokumen berikut ini:

- Formulir aplikasi
- Identitas foto dari pihak pengaju
- SHTI pernyataan yang berisi informasi terkait ikan yang ditangkap/didaratkan dari kapal untuk dokumentasi)
- Surat Izin penangkapan Ikan (SIPI)
- Pas Besar/Kecil
- Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
- Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI) – sebuah laporan yang disiapkan oleh petugas perikanan setelah melakukan verifikasi terhadap ikan yang didaratkan sebagai syarat diterbitkannya SHTI
- Fotokopi dari *logbook*
- Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) – jika didaratkan di luar Bitung

Ketika telah dikeluarkan, Lembar Awal SHTI mencakup informasi tentang spesies ikan, wilayah tangkap, tanggal, estimasi berat ketika ditangkap (*live weight*), estimasi berat yang akan didaratkan dan verifikasi berat setelah didaratkan.

Lembar Turunan SHTI diajukan oleh eksportir, yang umumnya pengalengan atau pengolahan. Hanya dapat dikeluarkan apabila melampirkan Lembar Awal SHTI yang telah mendapatkan verifikasi/persetujuan, dimana sebagian informasi akan diambil dari Lembar Awal SHTI tersebut. Untuk mendapatkan persetujuan Lembar Turunan SHTI, maka pihak pengaju harus memberikan dokumen sebagai berikut:

- Formulir aplikasi
- Identitas foto dari pihak pengaju
- Lembar Turunan SHTI
- Tanda terima pembelian ikan
- Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI)
- Fotokopi SIPI and Pas Kecil
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
- Formulir kapal
- Daftar pengepakan dan kuitansi
- Surat bukti pengangkutan (*bill of lading*)
- Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)
- *Notification of export goods*

Ketika telah dikeluarkan, Lembar Turunan SHTI mencakup deskripsi produk (contohnya ikan tuna segar, *frozen*, *loin*, etc.), spesies ikan dan berat yang didaratkan yang telah diverifikasi, daftar setiap kapal yang menyediakan bahan mentah (ikan) yang terdiri dari nama kapal dan nomor registrasi, nama dan alamat importir dan informasi terkait transportasi (nomor penerbangan dan nomor kuitansi, nama kapal dan bendera kapal, nomor *container*, dll.).

Di Bitung, untuk menghasilkan laporan dari pengolahan dan pengalengan ikan tuna yang memenuhi syarat untuk proses SHTI tergolong agak rumit, dan cukup memakan waktu dan biaya. Setelah dokumen diajukan, maka kemudian membutuhkan waktu lagi sekitar 5 hari untuk kemudian SHTI dapat dikeluarkan.

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM UJICOBA *CATCH DOCUMENTATION AND TRACEABILITY (CDT)* PADA RANTAI SUPLAI DI BITUNG

Sistem pengumpulan data di Indonesia saat ini tergolong cukup kompleks dan sebagian besar merupakan data dari hasil pencatatan di atas kertas (*paper-based*). Melalui sistem CDT elektronik, penggunaan kertas dapat dikurangi dan data yang dikumpulkan akan terintegrasi dengan sistem yang ada, baik itu di industri maupun di pemerintah.

TANTANGAN

Tantangan yang harus diantisipasi di dalam implementasi sistem CDT adalah:

Tidak adanya insentif finansial: Indikasi dari pelaku usaha di pasar lokal Bitung, menunjukkan bahwa tidak ada insentif secara finansial untuk produk laut yang tertelusur; tidak ada harga premium yang dibayarkan untuk produk dengan SHTI maupun produk yang memiliki informasi lebih dari yang disyaratkan oleh SHTI. Sebagai konsekuensi, sistem CDT yang dikembangkan di Bitung harus menyertakan manfaat lain agar proses adopsi CDT berhasil dengan adanya insentif/manfaat tersebut.

Sistem data dikelola oleh badan pemerintah yang berbeda-beda: Sistem pengumpulan data di titik penangkapan ikan saat ini dikelola oleh badan pemerintah yang berbeda-beda, dan validasi yang dilakukan belum optimal. Keakuratan data merupakan tantangan untuk perikanan di Bitung.

Keterbatasan verifikasi data untuk kapal skala kecil di titik penangkapan ikan: Saat ini, SHTI dan *logbook* tidak wajib untuk kapal skala kecil di bawah 5 GT (< 5 GT) dan Lembar Awal SHTI hanya disyaratkan bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa. Oleh karena bukan merupakan kewajiban, maka sebagian besar kapal penangkap skala kecil di Bitung tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan terkait ketertelusuran.

Pemantauan di laut yang terbatas pada kapal skala besar: Peraturan yang ada saat ini hanya mewajibkan sistem VMS dan AIS untuk kapal berukuran di atas 30 GT (>30 GT). Sistem ini dirasakan akan terlalu membebani bagi kapal-kapal skala kecil, sehingga dibutuhkan pengembangan sistem yang *cost effective* (tidak mahal) dan akurat agar dapat digunakan secara luas.

Konektivitas dan otomisasi yang terbatas menghambat pengecekan/validasi data: sistem dan proses pengelolaan data yang ada di Indonesia kurang dapat membantu otoritas lokal yang memantau dan mengeluarkan SHTI, di dalam mengakses data VMS untuk mengecek keakuratan data. Lebih jauh lagi, belum ada sistem otomatis yang memberikan peringatan jika ada sebuah pelanggaran di wilayah penangkapan. Peningkatan dalam konektivitas dan otomisasi sistem peringatan dapat memperkuat pihak yang berwenang di dalam mengelola kapal dan mencegah IUU *fishing*.

INSENTIF

Di Bitung, manfaat dan insentif dapat dimasukkan ke dalam desain dan aturan pada sistem CDT untuk mendorong proses adopsi, meningkatkan penetrasi pasar dan memastikan kegunaan dan keberlanjutannya. Insentif yang dibangun akan meningkatkan akses kepada:

Pasar yang stabil: Memastikan pasar stabil, yang kemudian akan menjadikan harga stabil ataupun tinggi, dapat membantu nelayan mendapatkan jaring pengaman di sektor keuangan, pedagang menjadi lebih efisien, dan pengolahan serta pengalengan menjadi lebih efisien dan terencana.

Jasa keuangan: Bagi nelayan, dan sebagian dari pedagang dan pengolah, akses ke jasa keuangan seperti ke bank dan rekening simpanan, produk jasa keuangan untuk pinjaman dan investasi, dan kredit jangka panjang, dapat dijadikan insentif untuk mematuhi persyaratan ketertelusuran.

Asuransi: Menyediakan akses ke produk asuransi, seperti asuransi kesehatan untuk nelayan ataupun untuk kapal dan fasilitas, dapat dijadikan insentif ketika berpartisipasi di dalam sistem CDT elektronik.

Jasa lainnya: Jasa lainnya, seperti pelatihan (praktek penangkapan yang lebih baik, cara penanganan ikan yang lebih baik, akuntansi sederhana, cara menjaga mutu/kualitas, dll.) dan subsidi dapat menjadi insentif dalam rangka mematuhi sistem CDT.

Informasi: Penyediaan informasi penting terkait cuaca, keselamatan, pengeluaran untuk operasi dan perubahan dalam regulasi pemerintah, kepada nelayan di laut, dapat menjadi insentif yang kuat untuk menggunakan sistem CDT. Pelaku yang berlokasi di pesisir/darat juga diundang dan akan mendapatkan informasi seperti harga dan regulasi pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar mereka.

Meningkatkan efisiensi: Memudahkan akses data dan proses *catch documentation* untuk nelayan akan dapat meningkatkan efisiensi mereka. Sama halnya dengan memudahkan *paperwork*, transaksi dan pelaporan untuk menghilangkan pengulangan pencatatan, akan membantu pedagang, pengolah dan pengaleng untuk patuh terhadap persyaratan ketertelusuran, dan dapat meneruskan informasi untuk membuat keputusan dan mempercepat proses.

INDONESIAN COASTAL TUNA SUSTAINABILITY ALLIANCE (ICTSA)

Tiga organisasi yang aktif di Indonesia, yaitu Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Asosiasi Perikanan Pole & Line Handline Indonesia (AP2HI) dan the International Pole and line Foundation (IPNLF), memiliki tujuan bersama untuk menjadikan ikan tuna Indonesia yang ditangkap satu-satu (*one-by-one*) dapat memasuki pasar dengan harga premium melalui berbagai skema sertifikasi, dengan ketertelusuran yang penuh. Mereka juga memiliki tujuan untuk menciptakan manfaat di tingkat komunitas nelayan skala kecil yang terlibat.

Di bulan Mei 2016, kepemimpinan dari tiga organisasi ini, bersama dengan tim dari USAID Oceans, menyepakati pentingnya membangun aliansi, yang kemudian dinamakan, the Indonesian Coastal Tuna Sustainability Alliance (ICTSA), yang akan bekerja mencapai tujuan besar bersama, dengan strategi dan rencana yang jelas untuk periode lima tahun ke depan (2016-2019). Marine Change dan Future of Fish akan mendukung pembentukan aliansi dan pembentukan kemitraan antara aliansi dengan USAID Oceans, dalam menganalisis sistem ketertelusuran dan membangun model bisnis berkelanjutan dan implementasi sistem CDT yang berkesinambungan secara jangka panjang.

Draft Strategi ICTSA:

- Fase 1 (September – Desember 2016): riset dan memahami tataran ketertelusuran, penilaian kesenjangan dari sistem CDT, analisis rantai nilai, pengembangan model bisnis aliansi dan desain awal dari ujicoba CDT
- Fase 2 (2017): implementasi ujicoba CDT, memantau dan menilai pencapaian, keberhasilan dan tantangan komunikasi, mengidentifikasi sumberdaya dan membangun ekspansi jangka panjang dan strategi untuk sektor ikan tuna yang lebih luas di Indonesia
- Fase 3 (2018-2019): ekspansi sistem CDT ke wilayah lain dan menyertakan lebih banyak perusahaan dan menjadi mandiri secara finansial di akhir fase ke-3

METODE

Marine Change melakukan penilaian rantai nilai dari sektor ikan tuna di Indonesia, berfokus di Bitung. Marine Change mengidentifikasi pelaku utama dan para pihak terkait dengan mendeterminasi lingkup rantai nilai dari ikan tuna mulai dari titik penangkapan ikan hingga ke konsumen akhir, menyusun perangkat wawancara semi-quantitative untuk data penangkapan lebih lanjut dan melihat titik transaksi dari rantai nilai utama, dan kemudian melakukan wawancara langsung di lapangan dengan pelaku utama dan para pihak terkait di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Tim survei mengidentifikasi pasar akhir, persyaratan ekspor mereka dan pandangan mereka terhadap peningkatan ketertelusuran. Tim survei kemudian memfokuskan penilaian terhadap persyaratan CDT bagi pihak-pihak yang berbeda di Bitung, menekankan peluang perluasan CDT dan mengeksplorasi studi kasus bisnis untuk implementasi sistem CDT di Bitung. Kegiatan yang dilakukan ini melalui riset data sekunder dan juga wawancara di lapangan.

The Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans), adalah kemitraan antara the United States Agency for International Development (USAID) dengan the Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), bekerja untuk memperkuat kerjasama regional dalam memerangi IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) fishing, mempromosikan perikanan yang berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman hayati laut di wilayah Asia-Pasifik. Tulang punggung program adalah pengembangan dan implementasi dari sistem dokumentasi hasil tangkap dan ketertelusuran (Catch Documentation and Traceability System - CDTS) yang berkelanjutan secara finansial dan spesifik per negara. CDTS ini akan terintegrasi dengan sistem yang telah ada di pemerintah, dan akan memasukkan elemen data kesejahteraan manusia, dan akan didemonstrasikan dengan mengacu kepada kerangka Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (EAFM).

Untuk informasi lebih lanjut, kontak info@oceans-partnership.org atau:

Tim Moore | USAID Oceans | Senior Partnerships Advisor

Tim.Moore@oceans-partnership.org